

Manajemen Komite Sekolah dalam Mencapai Mutu Pendidikan Berkualitas Pada UPTD SPF SD Negeri Pandan Sari Gunung Meriah
Management of School Committee in Achieving Quality Education at UPTD SPF SD Negeri Pandan Sari Gunung Meriah

Sulaiman Ibrahim

Program Magister Manajemen Pendidikan Islam, Pascasarjana, Universitas KH. Abdul Chalim Mojokerto

ARTICLE INFO

Article history:

Received 20 May 2026

Revised 25 May 2026

Accepted 30 May 2026

Available online 05 June 2026

Keywords

School Committee Management;
Education Quality; UPTD SPF SD Negeri
Pandan Sari Gunung Meriah



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

The school committee is an independent body that accommodates community participation in improving the quality, equity, and efficiency of education management in educational units. This study aims to: (1) describe the management of the School Committee in achieving quality education at UPTD SPF SD Negeri Pandan Sari Gunung Meriah; and (2) analyze the implementation of the School Committee's functions so that they can run effectively in achieving quality education at UPTD SPF SD Negeri Pandan Sari Gunung Meriah. This study uses a qualitative approach with a field research type. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews, observation, and documentation. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and verification/conclusion drawing. The results show that: (1) The management of the School Committee in achieving quality education covers three stages: (a) Program Planning, including planning for the procurement of qualified educators and education staff, planning for the provision of facilities and infrastructure, and planning for teacher competency enhancement training; (b) Program

Implementation through meetings with the school and parents, forming committees, fundraising, and physical and non-physical program implementation; and (c) Program Evaluation through direct classroom observation, quality control of school policies, and monitoring of the budget and facilities; (2) The implementation of the School Committee's functions runs effectively through efforts to encourage community participation, provide recommendations to the principal, raise funds, improve facilities, add student learning hours, and organize talent-based extracurricular activities.

ABSTRAK

Komite sekolah merupakan badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan manajemen Komite Sekolah dalam mencapai mutu pendidikan berkualitas pada UPTD SPF SD Negeri Pandan Sari Gunung Meriah; dan (2) menganalisis implementasi fungsi Komite Sekolah sehingga dapat berjalan secara efektif dalam mencapai mutu pendidikan berkualitas pada UPTD SPF SD Negeri Pandan Sari Gunung Meriah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Manajemen Komite Sekolah dalam mencapai mutu pendidikan berkualitas mencakup tiga tahapan, yaitu: (a) Perencanaan Program yang meliputi perencanaan pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas, perencanaan penyediaan sarana dan prasarana, serta perencanaan pelatihan peningkatan kompetensi guru; (b) Pelaksanaan Program melalui rapat bersama pihak sekolah dan wali murid, pembentukan panitia, penggalangan dana, serta pelaksanaan program fisik dan non-fisik; dan (c) Evaluasi Program berupa pengawasan langsung proses pembelajaran di kelas, pengendalian kualitas kebijakan sekolah, dan monitoring anggaran serta sarana prasarana; (2) Implementasi fungsi Komite Sekolah berjalan secara efektif melalui upaya mendorong partisipasi masyarakat, memberikan pertimbangan kepada kepala sekolah, menggalang dana, meningkatkan sarana prasarana, menambah jam belajar siswa, dan mengadakan kegiatan ekstrakurikuler berbasis minat bakat.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh faktor internal sekolah seperti kompetensi guru, kelengkapan kurikulum, dan ketersediaan sarana prasarana, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan lembaga pendidikan. Dalam konteks manajemen pendidikan modern, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) merupakan suatu keharusan agar penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel (Syaiful Sagala, 2011).

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, partisipasi masyarakat dalam pendidikan mendapatkan landasan hukum yang kuat. Pasal 56 undang-undang tersebut secara eksplisit menegaskan perlunya pembentukan Komite Sekolah sebagai lembaga mandiri yang berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan melalui pemberian pertimbangan, arahan, dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pada tingkat satuan pendidikan. Hal ini kemudian diperkuat melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 yang secara spesifik mengatur tentang Komite Sekolah dengan prinsip gotong royong sebagai fondasi pelaksanaannya (Permendikbud No. 75 Tahun 2016).

Keberadaan Komite Sekolah memiliki posisi strategis dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan. Sebagai jembatan antara masyarakat dan sekolah, Komite Sekolah diharapkan mampu menyuarakan aspirasi, menggalang partisipasi, dan membangun sinergi antara seluruh komponen pendidikan. Menurut Irwan Nasution (2017), pemberdayaan Komite Sekolah merupakan langkah kunci dalam mewujudkan manajemen berbasis sekolah yang demokratis dan bertanggung jawab. Komite Sekolah bukan sekadar lembaga formal yang bersifat seremonial, melainkan mitra strategis sekolah dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program pendidikan secara partisipatif.

Dalam praktiknya, fungsi dan peran Komite Sekolah di banyak satuan pendidikan masih belum berjalan secara optimal. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Komite Sekolah kerap hanya aktif dalam kegiatan-kegiatan tertentu seperti pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) atau pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sementara fungsi-fungsi substantif lainnya seperti pemberian pertimbangan kebijakan, peningkatan mutu pembelajaran, dan penggalangan partisipasi masyarakat masih berjalan minimal (Nurhasanah, 2015; Firdauza Ardi Nugraha, 2019). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang mengatur Komite Sekolah dengan implementasinya di lapangan.

Kesenjangan tersebut juga ditemukan pada konteks UPTD SPF SD Negeri Pandan Sari Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti pada Januari 2025, ditemukan beberapa permasalahan mendasar terkait pemberdayaan Komite Sekolah. Pertama, tidak adanya anggaran khusus dari pemerintah daerah untuk menunjang kinerja Komite Sekolah secara berkelanjutan; honor komite hanya dibayarkan secara tidak menentu dari dana BOS jika ada pekerjaan yang dilaksanakan. Kedua, Komite Sekolah kurang dilibatkan secara optimal dalam berbagai keputusan strategis sekolah, termasuk dalam pembangunan sarana dan prasarana serta penyelesaian masalah internal sekolah. Ketiga, pernah terjadi konflik antara pengurus komite dengan pihak sekolah akibat kurangnya transparansi dalam pengelolaan administrasi dan keuangan. Keempat, terjadi vakumnya kegiatan komite dalam periode-periode tertentu akibat tidak adanya sistem manajerial yang baik (Observasi awal, 06 Januari 2025).

Berbagai permasalahan tersebut tidak dapat dibiarkan berlarut-larut mengingat peran strategis Komite Sekolah dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan. Apabila Komite Sekolah tidak berfungsi secara optimal, maka agenda peningkatan mutu pendidikan di UPTD SPF SD Negeri Pandan Sari Gunung Meriah juga akan terhambat. Menurut Sudarwan Danim (2017), mutu pendidikan secara komprehensif mencakup input, proses, dan output pendidikan yang keseluruhannya memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat yang terwadahi dalam Komite Sekolah.

Secara teoretis, manajemen Komite Sekolah yang efektif mensyaratkan penerapan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Keempat fungsi ini harus berjalan secara terintegrasi dan berkesinambungan agar tujuan peningkatan mutu pendidikan dapat tercapai secara sistematis (Husaini Usman, 2011). Dalam konteks UPTD SPF SD Negeri Pandan Sari Gunung Meriah, penerapan fungsi-fungsi manajemen tersebut oleh Komite Sekolah menjadi sangat relevan mengingat tantangan dan permasalahan yang dihadapi.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah mengkaji berbagai aspek terkait Komite Sekolah dan mutu pendidikan dari berbagai sudut pandang. Nurhasanah (2015) mengkaji optimalisasi peran Komite Madrasah di Kecamatan Wedarijaksa; Firdauza Ardi Nugraha (2019) memfokuskan pada peran Komite Sekolah dalam peningkatan mutu pengelolaan pendidikan di SMP Negeri 1 Sukorejo Ponorogo; Fitri Astuti (2017) meneliti peran Komite Sekolah dalam peningkatan mutu layanan pendidikan di SMA Negeri 2 Sekampung Lampung Timur; sedangkan Kartini Dewi Ningsih dkk. (2021) meneliti pengaruh Komite Sekolah dan kepemimpinan kepala sekolah terhadap peningkatan mutu pendidikan. Penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting, namun masih sedikit yang memfokuskan kajian pada aspek manajemen Komite Sekolah secara menyeluruh, khususnya dalam konteks sekolah dasar di daerah terpencil seperti Kabupaten Aceh Singkil.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah utama, yaitu: (1) Bagaimana manajemen Komite Sekolah dalam mencapai mutu pendidikan berkualitas pada UPTD SPF SD Negeri Pandan Sari Gunung Meriah? dan (2) Bagaimana implementasi fungsi Komite Sekolah sehingga dapat berjalan secara efektif dalam mencapai mutu pendidikan berkualitas pada UPTD SPF SD Negeri Pandan Sari Gunung Meriah? Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai praktik manajemen Komite Sekolah serta memberikan masukan bagi pengembangan kebijakan pendidikan di tingkat daerah, khususnya dalam penguatan peran dan fungsi Komite Sekolah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada pertimbangan bahwa penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam, yaitu bagaimana manajemen Komite Sekolah dalam mencapai mutu pendidikan berkualitas di UPTD SPF SD Negeri Pandan Sari Gunung Meriah. Sebagaimana dikemukakan oleh Moleong (2010), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah.

Penelitian ini dilaksanakan di UPTD SPF SD Negeri Pandan Sari Gunung Meriah, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, dari bulan Januari sampai

dengan Juni 2025. Subjek penelitian meliputi: (1) Ketua Komite Sekolah; (2) Kepala Sekolah; (3) Guru-guru; dan (4) Tenaga Kependidikan yang dipilih secara purposif berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga cara. Pertama, wawancara mendalam (*in-depth interview*) dilakukan terhadap Ketua Komite Sekolah (BS), Kepala Sekolah (GN), dan beberapa guru (AS, DW, HS, SB, RD, AK) guna memperoleh data tentang pelaksanaan fungsi dan manajemen Komite Sekolah. Kedua, observasi partisipatif dilakukan untuk mengamati secara langsung kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Komite Sekolah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Ketiga, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder berupa profil sekolah, struktur organisasi, program kerja, laporan kegiatan, dan dokumen-dokumen relevan lainnya.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman (1992) yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan, yaitu: (1) Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang diperoleh dari lapangan; (2) Penyajian data, yaitu penyusunan informasi yang telah direduksi secara sistematis sehingga memungkinkan dilakukannya penarikan kesimpulan; dan (3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu penentuan makna dari data yang telah disajikan melalui konfirmasi berulang sehingga kesimpulan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

Keabsahan data dalam penelitian ini dijamin melalui teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber (membandingkan data dari berbagai informan) dan triangulasi teknik (membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi). Selain itu, dilakukan pengecekan anggota (*member checking*) dengan mengkonfirmasi temuan kepada informan untuk memastikan keakuratan interpretasi peneliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum UPTD SPF SD Negeri Pandan Sari Gunung Meriah

UPTD SPF SD Negeri Pandan Sari Gunung Meriah merupakan salah satu sekolah dasar berstatus negeri yang terletak di Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Sekolah ini didirikan pada tanggal 1 Januari 1970 di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hingga saat ini, sekolah tersebut telah terakreditasi B berdasarkan SK Akreditasi Nomor 746/BAN-SM/SK/2019. Sekolah menerapkan Kurikulum Merdeka dalam proses pembelajaran, dipimpin oleh Kepala Sekolah bernama Gunawan, S.Pd., Gr.

Jumlah peserta didik seluruhnya adalah 253 siswa yang terdiri dari 133 siswa laki-laki dan 120 siswa perempuan. Sekolah didukung oleh 21 orang guru terdiri dari 10 guru laki-laki dan 11 guru perempuan, serta 4 orang tenaga kependidikan. Visi sekolah adalah "Terwujudnya siswa-siswi yang berIGNAQ dan berIGNEK, berbudi pekerti luhur, cerdas, berbudaya, terampil berkarya, dan berakarakter Islami yang diridhai Allah Swt." Untuk mewujudkan visi tersebut, sekolah mengembangkan misi yang mencakup pengintegrasian pendidikan karakter, penerapan disiplin positif, dan pelaksanaan pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan siswa.

2. Manajemen Komite Sekolah dalam Mencapai Mutu Pendidikan Berkualitas

a. Perencanaan Program Komite Sekolah

Perencanaan merupakan tahap awal dan paling kritis dalam manajemen Komite Sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komite Sekolah UPTD SPF SD Negeri Pandan Sari Gunung Meriah telah melakukan perencanaan program secara sistematis, meskipun

dalam kapasitas sebagai pemberi masukan dan rekomendasi kepada pihak sekolah. Hal ini sesuai dengan peran Komite Sekolah sebagai lembaga non-struktural yang memberikan pertimbangan, bukan sebagai pengambil keputusan tunggal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Komite Sekolah (BS), perencanaan yang dilakukan meliputi: "Saya bersama anggota komite sekolah merencanakan sumber daya manusia untuk peningkatan mutu pendidikan pada sekolah ini, namun hanya dalam bentuk memberikan masukan kepada pihak sekolah, namun untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia diperlukan sebuah mekanisme yang mampu mengatur dan mengoptimalkan berbagai komponen sumber daya manusia yang ada di sekolah, diantaranya perencanaan pengadaan pendidik dan kependidikan yang berkualitas, perencanaan penyediaan sarana prasarana yang lengkap di sekolah, perencanaan pelatihan peningkatan kompetensi guru" (Wawancara, 16 Juni 2025).

Tiga aspek utama dalam perencanaan program Komite Sekolah tersebut saling berkaitan dan mendukung satu sama lain. Pertama, perencanaan pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas bertujuan memastikan bahwa sekolah memiliki SDM yang kompeten untuk menjalankan proses pendidikan yang bermutu. Komite Sekolah berperan mengidentifikasi potensi sumber daya lokal, termasuk alumni-alumni yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi, untuk dimanfaatkan sebagai tenaga pengajar tambahan. Kedua, perencanaan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang lengkap dan memadai untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar. Ketiga, perencanaan program pelatihan dan pengembangan kompetensi guru, mengingat guru merupakan ujung tombak kualitas pembelajaran (Wawancara GN, 17 Juni 2025).

Selain tiga aspek utama tersebut, Komite Sekolah juga secara aktif menyelenggarakan rapat bersama orang tua dan siswa untuk membahas program-program unggulan sekolah. Rapat tersebut menjadi forum strategis untuk membangun konsensus dan menggalang dukungan dari berbagai pihak. Beberapa program yang dibahas meliputi kegiatan les mata pelajaran untuk siswa, kegiatan kesenian, olahraga, tahfidzul Quran, dan kajian keislaman. Program unggulan yang menjadi prioritas adalah tahfidz dan kajian kitab kuning yang sedang dipersiapkan untuk diterapkan mulai tahun 2026 (Observasi, 19 Juni 2025).

Temuan ini sejalan dengan pendapat G.R. Terry dalam Husaini Usman (2011) yang menyatakan bahwa perencanaan adalah kegiatan memilih dan menghubungkan fakta dan menggunakan sejumlah asumsi mengenai masa datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Komite Sekolah UPTD SPF SD Negeri Pandan Sari telah menunjukkan praktik perencanaan yang sesuai dengan prinsip tersebut, yaitu menetapkan tujuan, menganalisis kondisi yang ada, dan merumuskan langkah-langkah untuk mencapai tujuan peningkatan mutu pendidikan (Husaini Usman, 2011).

b. Pelaksanaan Program Komite Sekolah

Tahap pelaksanaan program merupakan perwujudan nyata dari rencana yang telah disusun. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan program Komite Sekolah UPTD SPF SD Negeri Pandan Sari Gunung Meriah mencakup dua kategori utama, yaitu program fisik dan program non-fisik, yang keduanya dilaksanakan melalui mekanisme yang terstruktur dan melibatkan berbagai pihak.

Mekanisme pelaksanaan program fisik meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut: (1) perencanaan bersama antara pihak sekolah dan komite, meliputi pembahasan kepanitiaan, anggaran, dan jadwal pelaksanaan; (2) sosialisasi kepada wali murid untuk menggalang sumbangan sukarela; (3) pengumpulan dan pencatatan dana secara transparan dari berbagai

sumber; (4) pelaksanaan pembangunan fisik; dan (5) evaluasi hasil pembangunan. Melalui mekanisme ini, Komite Sekolah berhasil memfasilitasi pembangunan musala sekolah, ruang aula, dan perbaikan sarana kelas, sebagian besar dari hasil lobi kepada anggota DPRD dan pemerintah daerah (Wawancara BS, 16 Juni 2025).

Dalam hal pelaksanaan program non-fisik, Komite Sekolah terlibat aktif dalam pembinaan proses pembelajaran. Komite secara langsung mengunjungi kelas-kelas untuk mengamati cara guru mengajar dan merespons materi yang disampaikan kepada siswa. Hasil observasi tersebut kemudian dikomunikasikan kepada kepala sekolah sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pembinaan guru. Selain itu, Komite Sekolah memberikan masukan terhadap proses pengelolaan pendidikan secara keseluruhan, termasuk saran untuk mengadakan kegiatan belajar tambahan berupa les mata pelajaran bagi siswa (Observasi, 19 Juni 2025).

Dari aspek pembiayaan, Komite Sekolah berperan aktif memberikan pertimbangan tentang penggunaan anggaran sekolah dan melakukan lobi kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta perusahaan-perusahaan swasta untuk memperoleh dana tambahan guna menutupi kekurangan anggaran sekolah. Transparansi penggunaan dana menjadi komitmen yang dijaga bersama antara Komite Sekolah dan kepala sekolah (Wawancara GN, 17 Juni 2025).

Temuan ini relevan dengan fungsi Komite Sekolah sebagai pendukung (*supporting agency*) yang dikemukakan dalam Kepmendiknas No. 044/U/2002. Dukungan yang diberikan tidak hanya berupa material dan finansial, tetapi juga berupa pikiran, tenaga, dan jaringan sosial yang dimiliki oleh para anggota komite. Peran aktif Komite Sekolah dalam lobi-lobi kepada pemangku kepentingan eksternal menunjukkan bahwa komite telah melampaui fungsi minimalis dan bergerak menuju peran yang lebih substansial dan strategis (Sutomo, 2015).

c. Evaluasi Program Komite Sekolah

Evaluasi program merupakan tahap penutup dalam siklus manajemen yang bertujuan menilai sejauh mana program-program yang telah dilaksanakan berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komite Sekolah UPTD SPF SD Negeri Pandan Sari Gunung Meriah melakukan evaluasi secara berkala dan komprehensif terhadap berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan.

Bentuk evaluasi yang paling menonjol adalah pemantauan langsung proses belajar mengajar di kelas. Ketua Komite Sekolah secara rutin berkunjung ke setiap ruang kelas untuk mengamati cara guru mengajar, memantau kedisiplinan dan kehadiran guru, serta menilai efektivitas proses pembelajaran. Hasil pemantauan tersebut kemudian dilaporkan kepada kepala sekolah disertai saran dan rekomendasi perbaikan (Wawancara BS, 16 Juni 2025; Wawancara GN, 17 Juni 2025).

Selain pemantauan proses pembelajaran, Komite Sekolah juga melakukan pengawasan terhadap kualitas kebijakan sekolah. Setiap pengambilan keputusan strategis di tingkat sekolah selalu melibatkan Komite Sekolah, baik dalam forum musyawarah formal maupun konsultasi informal. Komite Sekolah mendorong agar setiap kebijakan sekolah dibuat secara partisipatif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk guru, orang tua siswa, dan tokoh masyarakat setempat (Wawancara BS, 16 Juni 2025).

Aspek lain yang menjadi perhatian evaluasi Komite Sekolah adalah pemantauan anggaran dan sarana prasarana. Komite secara periodik mengecek penggunaan anggaran sekolah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, kondisi fisik sarana dan prasarana sekolah dipantau secara rutin; jika ditemukan kerusakan, Komite Sekolah segera

menyarankan kepala sekolah untuk melakukan perbaikan atau rehabilitasi (Wawancara SB, 18 Juni 2025).

Praktik evaluasi ini mencerminkan penerapan fungsi pengawasan (*controlling*) dalam manajemen yang dikemukakan oleh G.R. Terry, yaitu sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai, apa yang sedang dilakukan, menilai pelaksanaan, dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan agar pelaksanaan sesuai dengan rencana dan standar (Husaini Usman, 2011). Komite Sekolah UPTD SPF SD Negeri Pandan Sari telah menginternalisasikan prinsip pengawasan ini dalam aktivitas sehari-hari mereka.

3. Implementasi Fungsi Komite Sekolah dalam Mencapai Efektivitas Pendidikan

a. Mendorong Perhatian dan Komitmen Masyarakat

Salah satu fungsi paling mendasar Komite Sekolah adalah membangun kesadaran dan komitmen masyarakat terhadap pentingnya pendidikan berkualitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komite Sekolah UPTD SPF SD Negeri Pandan Sari secara aktif mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan sekolah. Masyarakat sekitar sekolah menunjukkan antusias yang tinggi dalam mendukung program-program sekolah, termasuk selalu hadir dalam setiap forum musyawarah yang diselenggarakan oleh Komite Sekolah (Wawancara GN, 16 Juni 2025).

Ketua Komite Sekolah menegaskan: "Saya, sebagai Komite Sekolah berupaya semaksimal mungkin untuk mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu di UPTD SPF SD Negeri Pandan Sari Gunung Meriah, misalnya saya mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam segala kegiatan sekolah, saat sekolah membutuhkan bantuan masyarakat, dan hal tersebut saat ini terwujud, masyarakat sangat konsen membantu sekolah" (Wawancara BS, 18 Juni 2025). Komitmen ini merupakan modal sosial yang sangat berharga dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

b. Meningkatkan Efektivitas Pendidikan

Implementasi fungsi Komite Sekolah dalam meningkatkan efektivitas pendidikan diwujudkan melalui serangkaian inisiatif strategis. Berdasarkan hasil penelitian, upaya yang dilakukan meliputi: (a) mendorong kepala sekolah memaksimalkan peran, fungsi, dan tugasnya; (b) membangun kerjasama dengan berbagai pihak; (c) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses belajar mengajar; (d) mendorong peningkatan sarana prasarana sekolah; (e) memberikan tambahan jam belajar bagi siswa; (f) mendorong peningkatan kompetensi guru melalui berbagai pelatihan; dan (g) mendorong pengadaan ekstrakurikuler yang melatih kedisiplinan dan mengembangkan minat bakat siswa (Wawancara GN, 16 Juni 2025; Wawancara HS, 17 Juni 2025).

Kepala sekolah GN menyatakan: "Banyak hal yang dilakukan oleh Komite Sekolah dalam meningkatkan efektivitas pendidikan pada sekolah ini, salah satunya, (a) mengadakan kerja sama dengan kepala sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, (b) Komite Sekolah menyarankan untuk menekankan atau memaksimalkan waktu belajar, dan memberdayakan alat bantu belajar secara maksimal, (c) Komite Sekolah menyarankan agar memberikan jam tambahan belajar untuk siswa" (Wawancara GN, 16 Juni 2025).

c. Menampung dan Menganalisis Aspirasi Masyarakat

Fungsi Komite Sekolah sebagai wadah aspirasi masyarakat telah berjalan dengan baik di UPTD SPF SD Negeri Pandan Sari Gunung Meriah. Setiap aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang datang dari masyarakat ditampung secara aktif oleh Komite Sekolah untuk kemudian dianalisis dan diteruskan kepada pihak sekolah sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan. Mekanisme ini menciptakan alur komunikasi

dua arah yang sehat antara masyarakat dan sekolah (Wawancara GN, 16 Juni 2025; Wawancara AK, 17 Juni 2025).

Melalui fungsi ini, berbagai kebutuhan riil masyarakat seperti penambahan ruang kelas, penyediaan media pembelajaran, pengadaan kegiatan les, dan pembiayaan pendidikan bagi siswa kurang mampu berhasil diakomodasi dan ditindaklanjuti. Proses ini juga mendorong terciptanya kondisi yang transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana diamanatkan dalam regulasi tentang Komite Sekolah (Hasbullah, 2012).

d. Memberikan Pertimbangan untuk Meningkatkan Mutu Pembelajaran

Sebagai lembaga yang memiliki akses langsung ke komunitas sekolah, Komite Sekolah dapat memberikan pertimbangan yang berbasis pada realitas di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komite Sekolah secara konsisten memberikan pertimbangan kepada kepala sekolah terkait peningkatan mutu pembelajaran, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas tenaga pendidik. Salah satu pertimbangan paling konkret adalah dorongan kepada kepala sekolah untuk mengadakan pelatihan-pelatihan strategi mengajar yang relevan dengan perkembangan teknologi pendidikan masa kini (Wawancara BS, 18 Juni 2025).

Kepala sekolah mengakui kontribusi signifikan Komite Sekolah: "Setiap kebijakan sekolah yang saya buat itu berdasarkan masukan dan pertimbangan yang diberikan oleh Komite Sekolah, saya melibatkan semua unsur saat mengadakan musyawarah, yang tujuannya untuk melahirkan sebuah kebijakan, selama ini apapun yang saya lakukan berkaitan dengan sekolah selalu saya konsultasi terlebih dahulu dengan Komite Sekolah" (Wawancara GN, 17 Juni 2025). Pernyataan ini mengindikasikan hubungan kemitraan yang sehat dan produktif antara kepala sekolah dan Komite Sekolah.

e. Penggalangan Dana Masyarakat

Komite Sekolah UPTD SPF SD Negeri Pandan Sari telah menjalankan fungsi penggalangan dana secara aktif. Dana masyarakat berhasil dihimpun untuk membiayai berbagai kegiatan sekolah, termasuk kegiatan hari besar Islam, hari nasional, dan kegiatan ekstrakurikuler. Respons masyarakat terhadap penggalangan dana ini sangat positif, mencerminkan tingkat kepercayaan dan kepedulian masyarakat terhadap perkembangan sekolah (Wawancara GN, 16 Juni 2025).

Selain penggalangan dari wali murid dan masyarakat sekitar, Komite Sekolah juga melakukan lobi kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta perusahaan-perusahaan swasta untuk mendapatkan dukungan dana. Hasil lobi ini antara lain berupa pembangunan ruang aula dan musala sekolah yang merupakan kebutuhan mendesak bagi kegiatan sekolah. Upaya ini menunjukkan kreativitas dan jejaring sosial Komite Sekolah dalam mengatasi keterbatasan anggaran (Wawancara BS, 16 Juni 2025).

f. Mendorong Peran Serta Masyarakat dalam Penyediaan Sarana dan Bantuan Siswa Kurang Mampu

Komite Sekolah juga berperan penting dalam mendorong masyarakat untuk berkontribusi dalam penyediaan sarana dan prasarana serta dalam membantu pembiayaan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Salah satu capaian nyata adalah pembangunan ruang kelas tambahan yang dibiayai melalui sumbangan masyarakat atas inisiatif Komite Sekolah. Di samping itu, Komite Sekolah secara aktif mencari sponsor dan beasiswa dari pemerintah untuk memastikan tidak ada siswa yang terpaksa berhenti sekolah karena keterbatasan ekonomi (Wawancara GN, 16 Juni 2025; Wawancara AS, 17 Juni 2025).

Upaya ini sejalan dengan prinsip pemerataan akses pendidikan yang merupakan salah satu tujuan utama pembentukan Komite Sekolah. Dengan memastikan bahwa seluruh siswa, termasuk dari kalangan kurang mampu, memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas, Komite Sekolah berkontribusi nyata dalam mewujudkan keadilan pendidikan di tingkat komunitas (Nanang Fattah, 2012).

4. Diskusi: Efektivitas Manajemen Komite Sekolah

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa Komite Sekolah UPTD SPF SD Negeri Pandan Sari Gunung Meriah telah menjalankan fungsi manajemennya dengan cukup efektif. Hal ini terlihat dari berjalannya ketiga tahapan manajemen, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, secara berkesinambungan dan terstruktur.

Efektivitas Komite Sekolah dalam konteks ini dapat dianalisis melalui empat dimensi fungsi utamanya. Sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*), Komite Sekolah telah memberikan masukan yang konstruktif dan berbasis kebutuhan nyata kepada kepala sekolah. Sebagai pendukung (*supporting agency*), Komite Sekolah telah menggallang dukungan material, finansial, dan tenaga dari masyarakat. Sebagai pengontrol (*controlling agency*), Komite Sekolah menjalankan fungsi pengawasan yang efektif terhadap proses pembelajaran, kualitas kebijakan, penggunaan anggaran, dan kondisi sarana prasarana. Sebagai mediator, Komite Sekolah berhasil menjembatani kepentingan masyarakat dan sekolah sehingga tercipta sinergi yang produktif (Kepmendiknas No. 044/U/2002).

Temuan ini selaras dengan hasil penelitian Firdauza Ardi Nugraha (2019) yang menemukan bahwa peran komite sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan mediator secara keseluruhan berkontribusi positif terhadap peningkatan mutu pengelolaan pendidikan. Demikian pula dengan penelitian Kartini Dewi Ningsih dkk. (2021) yang menemukan pengaruh signifikan komite sekolah terhadap peningkatan mutu pendidikan. Kedua penelitian tersebut mengonfirmasi bahwa Komite Sekolah yang aktif dan berfungsi dengan baik merupakan faktor pendukung penting dalam peningkatan mutu pendidikan.

Namun demikian, terdapat beberapa aspek yang masih memerlukan penguatan. Pertama, kapasitas kelembagaan Komite Sekolah perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan pembinaan yang sistematis dari pemerintah daerah. Kedua, keberlanjutan pendanaan untuk operasional Komite Sekolah perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah agar komite tidak bergantung sepenuhnya pada dana BOS. Ketiga, mekanisme koordinasi antara Komite Sekolah dengan berbagai pemangku kepentingan perlu diperkuat untuk memastikan konsistensi dan efektivitas program jangka panjang (Farizal, 2014).

Dalam perspektif Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS), peran aktif Komite Sekolah UPTD SPF SD Negeri Pandan Sari mencerminkan esensi dari otonomi dan pengambilan keputusan partisipatif yang menjadi ruh dari MPMBS. Dengan semakin besarnya tingkat partisipasi masyarakat, semakin kuat pula rasa memiliki, tanggung jawab, dan dedikasi semua pihak terhadap kemajuan pendidikan di sekolah tersebut (Depdiknas, 2014). Keberhasilan Komite Sekolah dalam menggerakkan partisipasi masyarakat merupakan bukti nyata bahwa MPMBS dapat diimplementasikan secara efektif bahkan di sekolah-sekolah yang berada di daerah terpencil sekalipun.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik dua kesimpulan utama sebagai berikut.

Pertama, manajemen Komite Sekolah dalam mencapai mutu pendidikan berkualitas pada UPTD SPF SD Negeri Pandan Sari Gunung Meriah mencakup tiga tahapan yang saling berkaitan: (a) Perencanaan Program, yang meliputi perencanaan pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas, perencanaan penyediaan sarana prasarana yang lengkap, dan perencanaan pelatihan peningkatan kompetensi guru. Perencanaan ini dilaksanakan dalam bentuk masukan dan rekomendasi kepada kepala sekolah; (b) Pelaksanaan Program, yang terdiri dari program fisik dan non-fisik, melalui tahapan rapat bersama, penyusunan anggaran, pembentukan panitia, penggalangan dana dari berbagai sumber, pelaksanaan program, dan evaluasi; dan (c) Evaluasi Program, yang meliputi pemantauan langsung proses belajar mengajar di kelas, pengawasan kualitas kebijakan sekolah melalui musyawarah partisipatif, pemantauan kualitas program dan efeknya terhadap siswa, serta monitoring anggaran dan kondisi sarana prasarana sekolah.

Kedua, implementasi fungsi Komite Sekolah sehingga dapat berjalan secara efektif dalam mencapai mutu pendidikan berkualitas pada UPTD SPF SD Negeri Pandan Sari Gunung Meriah diwujudkan melalui: (a) mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; (b) menyarankan kepala sekolah untuk memaksimalkan peran, fungsi, dan tugasnya; (c) membangun kerjasama dengan berbagai pihak dari kalangan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat; (d) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses belajar mengajar; (e) mendorong peningkatan sarana prasarana; (f) memberikan jam tambahan belajar untuk siswa; (g) mendorong peningkatan kompetensi guru melalui berbagai pelatihan; dan (h) mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang melatih kedisiplinan dan mengembangkan minat bakat siswa.

Berdasarkan temuan penelitian ini, direkomendasikan kepada: (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil agar mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung operasional Komite Sekolah secara berkesinambungan; (2) Dinas Pendidikan agar mengadakan program pelatihan dan pembinaan bagi pengurus Komite Sekolah di seluruh satuan pendidikan; dan (3) Pihak Sekolah agar terus mempertahankan dan meningkatkan sinergi dengan Komite Sekolah dalam setiap aspek pengelolaan dan pengembangan pendidikan.

REFERENSI

- Asmendri. (2012). Teori dan Aplikasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah/Madrasah. Batu Sangkar: STAIN Batu Sangkar Press.
- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (1982). Qualitative Research for Educational: An Introduction to Theory and Methods. Boston: Allyn.
- Danim, Sudarwan. (2003). Agenda Pembaruan Sistem Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Danim, Sudarwan. (2017). Visi Baru Manajemen Sekolah. Jakarta: Bumi Aksara.
- Danim, Sudarwan & Khairil. (2012). Profesi Kependidikan. Bandung: Alfabeta.
- Daryanto. (2000). Administrasi Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Depdiknas. (2010). Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. Jakarta: Balitbang.
- Depdiknas. (2014). Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, Buku 1, Cet. Ke-2. Jakarta: Depdiknas.
- El Widdah, Minnah, dkk. (2012). Kepemimpinan Berbasis Nilai dan Pengembangan Mutu Madrasah. Bandung: Alfabeta.

- Farizal. (2014). Strategi Komite Madrasah Dalam Membantu Peningkatan Mutu Pendidikan Pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen. Tesis. Universitas Syiah Kuala.
- Fattah, Nanang. (2012). Standar Pembiayaan Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Fattah, Nanang. (2015). Landasan Manajemen Pendidikan. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Firdauza Ardi Nugraha. (2019). Peran Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pengelolaan Pendidikan (Studi Kasus di SMP Negeri 1 Sukorejo Ponorogo). Tesis. Pascasarjana IAIN Ponorogo.
- Fitri Astuti. (2017). Peran Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan di SMA Negeri 2 Sekampung Lampung Timur. IAIN Metro.
- Handoko, T. Hani. (2014). Manajemen Personalialia dan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: BPFE.
- Hasbullah. (2012). Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Huberman, A. M. & Miles, M. B. (1992). Analisis Data Kualitatif. Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI-Press.
- Husaini Usman. (2011). Manajemen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan, Edisi 3. Jakarta: Bumi Aksara.
- Irwan Nasution. (2017). Manajemen Pemberdayaan Komite Sekolah. Jakarta: Tim GP Press.
- Kartini Dewi Ningsih, Edi Harapan & Destiniar Destiniar. (2021). Pengaruh Komite Sekolah Dan Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan. Jurnal Manajemen Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan, Universitas PGRI Palembang.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
- Kompri. (2014). Manajemen Sekolah Teori dan Praktek. Bandung: Alfabeta.
- Made Pidarta. (2014). Manajemen Pendidikan Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
- M. Manullang. (2011). Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, Lexy J. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Khairul Umam. (2019). Komite Madrasah Dalam Konteks Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan Islam. Jurnal Al-Hikmah STAIBA Purwoasri Kediri.
- Nanang Fattah. (2012). Standar Pembiayaan Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurhasanah. (2015). Optimalisasi Peran Komite Madrasah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan (Studi Kasus di Madrasah Aliyah Se-Kecamatan Wedarijaksa). Tesis. Pascasarjana IAIN Kudus.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Rusman. (2010). Manajemen Kurikulum. Bandung: Raja Grafindo Persada.
- Rusman. (2017). Belajar & Pembelajaran: Berorientasi Standar Proses Pendidikan. Jakarta: Kencana.
- Sagala, Syaiful. (2011). Manajemen Strategik Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan, Cet. V. Bandung: Alfabeta.
- Samino. (2010). Kepemimpinan Pendidikan. Solo: Fairus Media.
- Sudarwan Danim & Khairil. (2012). Profesi Kependidikan. Bandung: Alfabeta.
- Sutomo. (2015). Manajemen Sekolah. Semarang: UPT Unnes Press.
- Syahrizal Abbas. (2011). Manajemen Perguruan Tinggi Beberapa Catatan, Cet. 3. Jakarta: Kencana.

- Triyo Marno & Supriyatno. (2014). *Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam*. Bandung: Refika Aditama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Winardi. (2016). *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Yadi Haryadi, dkk. (2016). *Pengembangan Peran Komite Sekolah*. Jakarta: Depdiknas Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Yusak Burhanuddin. (2012). *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.